

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.
2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

## 2. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN PENGENDALIAN INFLASI DI DAERAH

Berdasarkan data rilis BPS, komoditas penyumbang inflasi ada pada komoditi cabai rawit sebesar 2,26 persen; daging babi sebesar 1,58 persen; tomat sebesar 0,86 persen; beras sebesar 0,68 persen; kangkung sebesar 0,51 persen; ikan cakalang/ ikan sisik sebesar 0,28 persen; sigaret kretek mesin (SKM) sebesar 0,27 persen; gula pasir, cakalang diawetkan, dan daun bawang masing-masing sebesar 0,24 persen; bawang merah sebesar 0,22 persen; daging ayam ras sebesar 0,19 persen; bawang putih sebesar 0,16

persen; sigaret kretek tangan (SKT) sebesar 0,10 persen; semangka sebesar 0,07 persen; sigaret putih mesin (SPM) sebesar 0,06 persen; buncis dan jahe masing-masing sebesar 0,05 persen; ikan tuna dan terong masing masing sebesar 0,04 persen. Untuk memenuhi kebutuhan Masyarakat akan komoditas penyumbang inflasi masih perlu didatangkan dari tempat lain seperti beras yang merupakan komoditas penyumbang inflasi Ketika menjelang hari besar keagamaan nasional.

Klasifikasi permasalahan :

- Ketersediaan pasokan :
  - Perubahan cuaca yang mengganggu hari produksi pangan sehingga menuntut pengaturan pola tanam dan pemanfaatan teknologi pangan
  - Belum masuk masa panen
- Keterjangkauan harga :
  - Resiko gejolak harga pada perayaan HBKN dan pasca HBKN
  - Panen yang tidak serentak sehingga mengganggu suply ke pasar
- Kelancaran distribusi :
  - Adanya disparitas harga sehingga banyak petani yang berusaha menjual hasil panen keluar
  - Pengawasan Arus Transportasi darat dan laut
- Komunikasi efektif :
  - Belum pahamnya sebagian masyarakat tentang pentingnya pengendalian inflasi perlu edukasi yang terus menerus.
  - Peran penyuluh dan pengawasan kepada para petani champion pada saat panen.

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.
4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

## 5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

### 5. REKOMENDASI KEBIJAKAN PENGENDALIAN INFLASI DI DAERAH

Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di kabupaten Minahasa

Utara pada triwulan II Tahun 2024 adalah :

- a) Pemantauan harga komoditas penyumbang Inflasi dan ketersediaan bahan pangan serta kelancaran distribusi secara berkelanjutan;
- b) Melanjutkan program kerja Upaya pengendalian Inflasi secara berkesinambungan khususnya bidang pertanian dalam meningkatkan produksi pertanian;
- c) Dalam mengantisipasi dampak inflasi anggota TPID tetap monitoring dalam menjaga kestabilan harga bahan pangan;
- d) Monitoring dan pendampingan penerima hibah bantuan bibit sampai masa panen.
- e) Melakukan Penawaran Kerjasama Antar Daerah (KAD) dalam pemenuhan komoditas penyumbang inflasi.
- f) Pemanfaatan Dana Desa sebagian untuk upaya pengendalian inflasi.

### 4. EVALUASI KEBIJAKAN PENGENDALIAN INFLASI DI DAERAH

Evaluasi pengendalian inflasi di Kabupaten Minahasa Utara pada triwulan II Tahun 2024 adalah:

- a) Pentingnya penguatan koordinasi antar OPD terkait di Minahasa Utara dan koordinasi dengan TPID Provinsi Sulawesi Utara dalam Upaya pemenuhan kebutuhan dan kelancaran distribusi komoditas pangan di Kabupaten Minahasa Utara dengan melakukan Gerakan Pangan Murah dan Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah;
- b) Dalam mendukung ketersediaan bahan pangan sepanjang tahun dan kelancaran distribusi serta keterjangkauan harga diperlukan kerjasama dengan Dinas Perhubungan untuk mengatur lalu lintas darat dan laut yang mendistribusikan bahan pangan.
- c) Dengan cuaca yang ekstrem yang bisa mengganggu hasil produksi pertanian diperlukan Kesiapan Pemerintah dalam menanggulangi dan menghadapi perubahan cuaca seperti ELNINO atau LA NINA dengan memberikan bantuan atau bekerja sama dengan dinas Pemadam kebakaran